

ANALYSIS OF GENERAL ALLOCATION FUND EFFICIENCY AND REGIONAL ORIGINAL INCOME ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF CITY GOVERNMENTS IN PROVINCE ACEH



Malinda Sari^{*a}, Ichsan^{*b},

**Faculty of Economic and Business Universitas Malikussaleh*

aCorresponding author : linda.jbjiber@gmail.com

b ichsan28@yahoo.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Keywords:

publicl Financial Performance, Local Revenue, General Allocation Funds, Data Envelopment Analysis

This study aims to analyze the efficiency of general allocation funds (DAU) and local own-source revenues (PAD) on the financial performance of city governments in Aceh Province. The data used in this study is panel data, which includes input variables of general allocation funds, regional original income and output variables of financial performance in 2015-2018. The method used in this research is Data Envelopment Analysis (DEA) using DEAP software version 2.1. The analysis shows that in 2015 there were 4 cities that experienced efficient, namely Banda Aceh City, Sabang City, Langsa City and Subulussalam City, in 2016 there were 4 cities that showed efficient, namely Banda Aceh City, Sabang City, Langsa City and Kota Subulussalam, In 2017, the number of cities that showed efficient was 4 cities, namely Banda Aceh City, Langsa City, Lhokseumawe City and Subulussalam City, while in 2018, there were 5 cities that showed efficient, namely Banda Aceh City, Sabang City, Langsa City, Lhokseumawe City and Subulussalam City. To improve its financial performance, the city governments in Aceh Province, especially those whose financial performance has not reached the level of efficiency should make a draft budget in accordance with regional needs by involving all stakeholders (stekleholders) in the region.

I. PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu daerah otonomi yang memiliki kedudukan, fungsi peranan, yang penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Provinsi Aceh hingga saat ini terdiri dari sejumlah kabupaten dan kota yang setiap kabupaten/kota tersebut memiliki kewenangan dalam mengelola penerimaan maupun pengeluaran secara mandiri.

Otonomi daerah ialah salah satu bentuk transformasi masa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki hak yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka pemerintah kabupaten/kota harus mampu mencapai tingkat efisiensi dari kinerja pemerintahannya.

Provinsi Aceh, sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, dalam mengelola daerahnya

secara mandiri. Tingkat kemandirian daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sementara rendahnya kemandirian daerah akan menurunkan kinerja pemerintah daerah. Provinsi Aceh memiliki berbagai sumber daya untuk meningkatkan kinerjanya. PAD ialah salah satu dari pendapatan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. PAD tersebut diharapkan dapat menjadi komponen pendapatan yang penting selain sumber pendapatan dari transfer pemerintah pusat seperti DAU, DAK dan dana bagi hasil (DBH).

Pendapatan asli daerah (PAD) pada dasarnya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah melakukan kegiatan pemerintahan dan pengembangan daerah (Julitawati, 2012). Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002), Sayangnya peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masih sangat kecil

dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%, (Kustianingsih, 2018).

Searah dengan tujuan otonomi dan desentralisasi daerah, pengelolaan keuangan yang bersumber dari DAU, PAD dan berbagai sumber pendapatan lainnya (DAK, DBH, dan lain-lain) efektif serta optimal. Apabila pengelolaan keuangan efisien dan efektif, maka pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ukuran efisiensi dari penggunaan pendapatan asli daerah, dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian pengelolaan keuangan daerah, (Neisha, 2018). Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah tercermin dari realisasi belanjanya yang merupakan rasio antara realisasi belanja dan anggaran yang dialokasikan untuk belanja.

Kemampuan kota-kota di Provinsi Aceh dalam menggali sumber sumber PAD berbeda-beda. Kota Banda Aceh merupakan kota yang paling besar memperoleh PAD pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 331,906,745,756,- Sementara Kota Subulussalam merupakan kota yang menerima PAD paling rendah, yaitu hanya Rp. 71,470,458,584.

Namun jumlah penerimaan tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan realisasi belanja masing-masing pemerintah kota. Dimana belanja pada Tahun 2018 Kota Banda Aceh mencapai Rp. 1,940,049,757,506,- sedangkan Kota Subulussalam adalah kota dengan realisasi belanja terendah, yaitu Rp. 1,226.909.469.098,-. Jumlah tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sumber PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi juga membutuhkan sejumlah bantuan dari pemerintah Pusat.

Bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari DAU tertinggi diterima Kota Banda Aceh, yaitu mencapai Rp. 903,438,762,000. Adanya perbedaan DAU tersebut juga disebabkan oleh tingkat kemandirian daerah yang semakin baik dalam menggali sumber kekayaan daerahnya. Pada tahun 2018 jumlah DAU yang di butuhkan paling rendah yaitu Rp. 519,863,099,500,- yaitu pada Kota Subulussalam

Penelitian sebelumnya yang member focus pada dana alokasi umum dan kinerja keuangan sudah dilakukan oleh (Neisha, 2018), (Rusydi, 2015), (Mardiyah, 2011), menyimpulkan bahwa dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah sudah efisien. Selanjutnya penelitian yang memberi focus pada pendapatan asli daerah

dan kinerja keuangan sudah dilakukan oleh (Neisha, 2018), (Simanjuntak *et al.* 2013) menyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan sudah berjalan efisien.

Perbedaan penelitian ini untuk tujuan penelitian sebelumnya terdapat pada metode yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis data regresi linier berganda sementara penelitian ini menggunakan analisis DEA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi seberapa besarkah tingkat efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Lima (5) Kota di Provinsi Aceh.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Mulyadi, 2001).

Berdasarkan hasil dari penelitian (Mulyadi, 2001) kinerja keuangan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan pemerintah yang pengukurannya dilaksanakan baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan.

Menurut (Sucipto, 2005), kinerja keuangan pemerintah daerah ialah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ialah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2004). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah ialah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian artinya bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut (Halim, 2002). Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menurut (Halim, 2004) Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD), semakin kuat pula tingkat kemandirian daerahnya dan sebaliknya pula, semakin rendah pendapatan asli daerah maka semakin rendah pula tingkat kemandirian daerah tersebut.

Rasio kemandirian yang rendahnya menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga rendah dan perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan menggali potensi riil yang dimiliki. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kontribusi maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

(Antari dan Sedana, 2018), menyatakan bahwa Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bojanic, 2013), (Chude dan Chude, 2013) belanja modal dapat meningkatkan taraf masyarakat yang tergolong dalam kalangan bawah. Tingginya belanja modal menyebabkan semakin tinggi pula produktivitas perekonomian, dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah (Darwanis dan Saputra, 2014).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah suatu daerah yang berpenghasilan dari pendapatan Anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Dana perimbangan keuangan adalah konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk

memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal Abdullah dan (Halim, 2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harianto dan Adi, 2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa “kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.” Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan daerah berupa DAU yang besar maka belanja modal akan meningkat.

(Tajuddin dkk, 2014) dalam penelitian *The Effects of General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Revenue-Sharing Funds on Investment, Economic* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap investasi. Perbedaan ini terjadi karena ukuran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah investasi dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan *Structural Equation Modeling* (SEM).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang dikelola secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hasil penelitian (Bastian, 2002) mengungkapkan bahwa “Penerimaan pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”.

Secara garis besar pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakatnya dan juga hasil pengelolaan sumber daya ekonomi asli daerah.

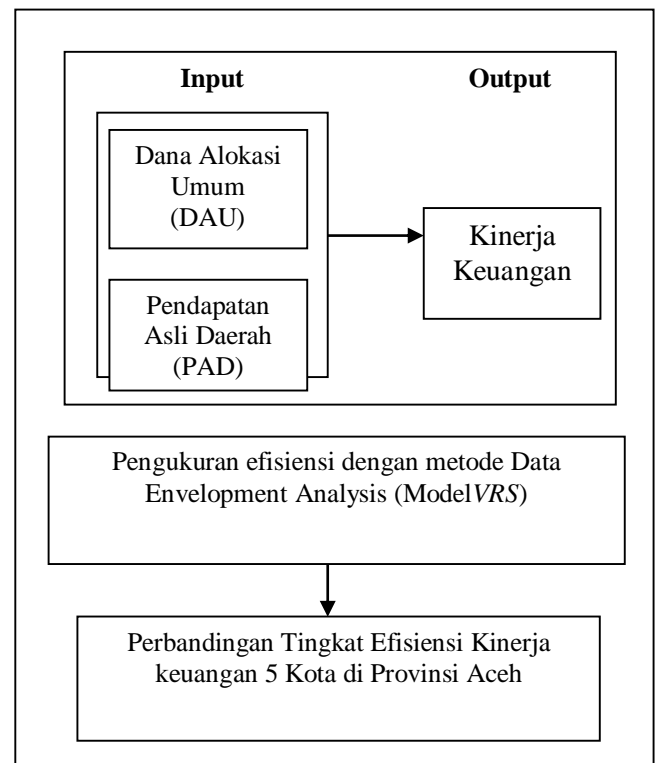
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung

memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut (Halim, 2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sumawan dan Sukartha, 2016) bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat (Taras dan Artini, 2017).

Penelitian (Nugroho dan Rohman, 2012) mengartikan hasil bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut dapat berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. (Darwanis dan Saputra, 2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. (Julitawati dkk, 2012) dan (Wenny, 2012) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada sisi lain penelitian yang dilakukan (Mulyani dan Wibowo, 2017) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memberikan indikasi bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- $H_1 =$ Dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh sudah efisien
- $H_2 =$ Pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh sudah efisien

3. METODE PENELITIAN

Data dan Penghasilan Data.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Data didalam penelitian ini merupakan data dari 5 kota yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam dengan variabel input adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan variabel output adalah kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Aceh berbentuk data tahunan yang dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang di peroleh secara online.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Input

1. Dana Alokasi Umum (X_1)
Dana alokasi umum merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dana alokasi umum di ukur dalam satuan Rupiah
2. Pendapatan Asli Daerah (X_2)
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang mampu di terima oleh Provinsi Aceh. Pendapatan asli daerah di ukur dalam satuan Rupiah.

Variabel Output

1. **Kinerja Keuangan Pemerintah Kota (Y)**
Kinerja keuangan pemerintah rasio antara realisasi belanja daerah dan target (rencana) belanja daerah, diukur dalam satuan persen.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Data Envelopment Analysis* dengan pendekatan *Variable Return to Scale (VRS)*. Model VRS digunakan untuk melihat output yang dihasilkan dari penggunaan beberapa input. Model VRS digunakan apabila variabel input dan variabel output tidak memiliki hubungan dimana penambahan input tidak menambahkan jumlah output yang proporsionalnya sehingga efisiensinya bisa saja naik atau turun.

Dalam metode analisis DEA. Pengukuran yang berorientasi pada input menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan dengan berdasarkan jumlah output yang telah dihasilkan. Dengan menggunakan model berorientasi input, maka model tersebut akan menghitung pengurangan input yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang efisien dengan output yang tetap.

Beberapa penelitian cenderung memilih pendekatan berorientasi input karena jumlah input menjadi keputusan variabel. Model DEA *input-oriented* bertujuan untuk mengurangi jumlah input pada tingkat output.

Sementara model *output-oriented* bertujuan untuk memaksimalkan tingkat output dari penggunaan input. Model lain yang dapat memaksimalkan kelebihan input dan kekurangan output secara bersamaan, diwakili oleh model *Additive* (Cooper *et al.* 2006).

Analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi antara variabel input yaitu DAU dan PAD dengan variabel output yaitu kinerja keuangan pemerintah.

Selanjutnya merupakan model dari *Data Envelopment Analysis* (Coelli, 1996):

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i \cdot y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}}$$

Dimana :

- hs = Menunjukkan efisiensi Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
- m = Menunjukkan output Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
- n = Menunjukkan input Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
- U_i = bobot output i yang terdapat di Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
- Y_{is} = Jumlah output i yang terdapat di Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
- X_{js} = Jumlah input j yang terdapat di Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
- V_j = Bobot input j yang terdapat di Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah.

Rasio efisiensi (hs) kemudian dimaksimumkan dengan kendala sebagai berikut:

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i \cdot y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}} \leq 1$$

Analisis dari *Data Envelopment Analysis*:

1. $H_s = > 1$, apabila suatu sektor atau variabel yang memiliki nilai tingkat efisiensi lebih dari 1 atau 0 sampai dengan 100% dapat dikatakan efisien.
2. $H_s = < 1$, apabila suatu sektor atau variabel yang memiliki nilai tingkat efisiensi kurang dari 1 maka dapat dikatakan tidak efisien atau kurang efisien.

Suatu variabel efisien memiliki nilai sebesar 1,000 dan sebaliknya apabila nilai DMU 0 atau lebih kecil dari satu maka tidak efisien. Suatu *Decision Making Unit* (DMU) memiliki kemampuan paling baik jika nilai efisien relative sebesar 1 atau 100%, sedangkan *Decision Making Unit* (DMU) lain yang nilainya dibawah 100% dikatakan kemampuannya masih dibawah *Decision Making Unit* (DMU) yang telah efisien. Kesimpulannya adalah apabila suatu sektor atau

variabel yang memiliki tingkat efisiensi dibawah 1 maka nilai dapat dikatakan kurang efisien. Sedangkan sektor atau variabel yang memiliki tingkat efisiensi diatas 1 maka nilai dapat dikatakan efisien.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Envelopment Analysis

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan DEA, maka dapat diketahui tingkat efisiensi DAU dan PAD pada kinerja keuangan Pemerintah Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2018 dengan asumsi apabila nilai efisiensi 1 maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya, jika nilai efisiensi mendekati 0, maka inefisien. Berikut merupakan ringkasan hasil perhitungan dari DEA dalam pendekatan VRS. Adapun hasil analisis menggunakan DEAP-XP1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Efisiensi Input –Oriented Model

Keterangan	Tahun	Kota Banda Aceh	Kota Sabang	Kota Langsa	Kota Lhokseumawe	Kota Subulussalam
Crste	2015	1.000	0.966	0.988	0.959	0.958
Vrste		1.000	1.000	1.000	0.988	1.000
Scale		1.000	0.966	0.988	0.971	0.959
Crste	2016	1.000	0.966	0.988	0.964	0.959
Vrste		1.000	1.000	1.000	0.992	1.000
Scale		1.000	0.966	0.988	0.972	0.959
Crste	2017	1.000	0.970	0.985	1.000	0.978
Vrste		1.000	0.999	1.000	1.000	0.978
Scale		1.000	0.970	0.985	1.000	0.978
Crste	2018	1.000	0.992	0.988	1.000	0.961
Vrste		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Scale		1.000	0.992	0.988	1.000	0.961

Sumber : Hasil Penelitian, 2019.

Kota yang bernilai efisiensi 1 pada metode VRS disebut sebagai DMU yang efisien secara lokal. Berdasarkan Tabel 4.12, hanya Kota Banda Aceh yang efisien secara teknis dan skala selama empat tahun berturut-turut. Pada Tahun 2015 terdapat 4 Kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Subulussalam

Pada Tahun 2016 terdapat 4 kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Subulussalam. Sementara pada Tahun 2017 jumlah kota yang efisien secara teknis menurun yaitu 4 kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Sementara pada Tahun 2018 terdapat 5 kota yang efisien secara teknis yaitu

Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

Untuk kota yang mempunyai nilai efisien 1,000 menunjukkan bahwa kombinasi antara input yang digunakan dengan output sudah sesuai. Jumlah dana alokasi umum yang di terima dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah yang di hasilkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah telah mampu membelanjakan anggaran sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Belanja).

Kota yang tidak efisien dalam hal ini perlu mengurangi jumlah output untuk mencapai tingkat efisiensi, Pengurangan output yang dimaksud yaitu mengurangi sejumlah belanja seperti belanja pegawai sehingga dananya dapat digunakan untuk belanja pembangunan dan infrastruktur. Pemerintah harus memperhatikan kembali jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk belanja daerahnya setiap tahun pada masing-masing kategori.

Pemerintah dapat membuat perencanaan anggaran dengan melibatkan satuan kerja perangkat kota, sehingga pemerintah dapat mengetahui sejumlah dana yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya

Tingkat Efisiensi dan Inefisiensi
Pada bagian ini memuat pembahasan mengenai tingkat efisiensi dan inefisiensi yang dilihat dari penggunaan input pada variabel kinerja keuangan daerah pada masing-masing 5 Kota di Provinsi Aceh berdasarkan hasil perhitungan efisiensi DEA.

Tingkat Efisiensi Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tingkat efisiensi di gunakan untuk melihat apakah pemerintah Kota Banda Aceh sudah efisien dalam mengelola PAD dan DAU guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Suatu daerah di katakan efisien apabila nilai efisiensi sebesar 1,000. Nilai original, target, *radial movement* dan *slack movement* input-output Kota Banda Aceh yang efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 3
Nilai Original, Target, Radial Movement dan Slack Movement Input Output Kota Banda Aceh yang Efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 (%)

Input Output	Tingkat Efisiensi	Original value	Target Value	Radial movement	Slack movement
2015	1.000				
Kinerja Keuangan		26.070	26.070	0.000	0.000
DAU		27.140	27.140	0.000	0.000
PAD		89.590	89.590	0.000	0.000
2016	1.000				
Kinerja Keuangan		24.710	24.710	0.000	0.000
DAU		26.590	26.590	0.000	0.000
PAD		110.720	110.720	0.000	0.000
2017	1.000				
Kinerja Keuangan		26.210	26.210	0.000	0.000
DAU		27.120	27.120	0.000	0.000
PAD		97.370	97.370	0.000	0.000
2018	1.000				
Kinerja Keuangan		26.530	26.530	0.000	0.000
DAU		27.530	27.530	0.000	0.000
PAD		99.520	99.520	0.000	0.000

Sumber : Hasil olah data, 2019

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat kita lihat bahwa Kota Banda Aceh saetiap tahun selama 2015-2018 sudah mampu mencapai tingkat efisien yaitu sebesar 1.000, dimana *original value* sama dengan *target value* dengan *slack moment* sebesar 0. Berdasarkan hasil DEA menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah mampu mengelola sejumlah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sehingga memaksimalkan tingkat kinerja keuangan daerahnya.

Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sabang

Bedasarkan hasil pengujian menggunakan pendekatan VRS ouput oriented dapat dilihat bahwa nilai skala efisiensi hasil kinerja keuangan kota yang inefisien berada dibawah satu (<1) yaitu 0.999 pada tahun 2017. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan kinerja keuangan kota tidak efisien, dikarenakan penggunaan input yang belum mencapai skala efisiensi, sehingga menyebabkan output yang dihasilkan juga tidak efisien. Nilai original, target, *radial movement* dan *slack movement* input-output Kota Sabang yang efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4
Nilai Original, Target, Radial Movement dan Slack Movement Input Output Kota Sabang yang Efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 (%)

Tahun	Tingkat Efisiensi	Original value	Target Value	Radial movement	Slack movement
2015	1,000				
Kinerja Keuangan		24.630	24.630	0.000	0.000
DAU		26.530	26.530	0.000	0.000
PAD		88.520	88.520	0.000	0.000
2016	1.000				
Kinerja Keuangan		24.710	24.710	0.000	0.000
DAU		26.590	26.590	0.000	0.000
PAD		110.720	110.720	0.000	0.000
2017	0.999				
Kinerja Keuangan		24.610	24.750	0.000	0.140
DAU		26.590	26.570	-0.020	0.000
PAD		92.970	92.500	-0.070	0.400
2018	1,000				
Kinerja Keuangan		5.090	5.090	.000	0.000
DAU		7.000	7.000	.000	0.000
PAD		4.880	4.880	.000	0.000

Sumber : Hasil olah data 2019

Berdasarkan hasil Tabel 4 di atas, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Sabang belum mampu mencapai tingkat efisiensi kinerja keuangan, dimana nilai *technical efisien* lebih kecil dari pada 1.000 yaitu sebesar 0.999. Berdasarkan hasil DEA menunjukkan bahwa *radial movement* pada input DAU sebesar - 0.020%, yang Artinya pemerintah kota sabang harus mengurangi input dari DAU sebesar 0.020% agar mancapai tingkat efisiensi. Selanjutnya *radial movement* pada input PAD sebesar -0.070%. Artinya Pemerintah Kota Sabang perlu mengurangi PAD sebesar 0.070%, dengan *sleck movement* sebesar -0.400%, agar mencapai tingkat efisiensi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2018 Pemerintah Kota Sabang mampu mencapai tingkat efisiensi kinerja keuangan dimana nilai *target value* 1.000.

Tingkat Efisiensi Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa

Pemerintah Kota Langsa selama periode 2015 sampai 2018 mampu mencapai tingkat efisiensi dimana nilai tehnikal efisiensi sebesar 1,000. Nilai original, target, *radial movement* dan *slack movement* input-output Kota Langsa yang efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 dapat dilihat pada 5 berikut ini :

Tabel 5

Nilai Original, Target, Radial Movement dan Slack Movement Input Output Kota Langsa yang Efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 (%)

Tahun	Tingkat Efisiensi	Original value	Target Value	Radial movement	Slack movement
2015	1,000				
Kinerja Keuangan		25.420	25.420	0.000	0.000
DAU		26.780	26.780	0.000	0.000
PAD		99.780	99.780	0.000	0.000
2016	1,000				
Kinerja Keuangan		25.510	25.510	0.000	0.000
DAU		26.840	26.840	0.000	0.000
PAD		104.400	104.400	0.000	0.000
2017	1,000				
Kinerja Keuangan		25.540	25.540	0,000	0.000
DAU		26.840	26.840	0.000	0.000
PAD		108.570	108.570	0.000	0.000
2018	1,000				
Kinerja Keuangan		25.930	25.930	0,000	0.000
DAU		27.240	27.240	0.000	0.000
PAD		110.420	110.420	0.000	0.000

Sumber : Hasil olah data, 2019

Berdasarkan hasil Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Langsa selama setiap tahun 2015-2018 mampu mencapai tingkat efisiensi kinerja keuangannya yaitu dengan membelanjakan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah. Tingkat efisiensi selama tahun 2015 sampai 2018 sebesar 1,000 atau dikatakan efisien.

Tingkat Efisiensi Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan pendekatan VRS output oriented dapat dilihat bahwa nilai tehnikal efisiensi kinerja keuangan pada Tahun 2015 sebesar 0,988 lebih kecil dari 1,000 dan pada tahun 2016 sebesar 0,992 lebih kecil

dari 1,000. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan kinerja keuangan tidak efisien, dikarenakan penggunaan input yang belum mencapai skala efisiensi, sehingga menyebabkan output yang dihasilkan juga tidak efisien. Nilai original, target, *radial movement* dan *slack movement* input-output Kota Lhokseumawe yang efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7

Nilai Original, Target, Radial Movement dan Slack Movement Input Output Kota Lhokseumawe yang Efisiensi dan inefisiensi periode 2015-2018 (%)

Tahun	Tingkat Efisiensi	Original value	Target Value	Radial movement	Slack movement
2015	0.988				
Kinerja Keuangan		24.760	24.760	0.000	0.000
DAU		26.870	26.556	-0.314	0.000
PAD		97.560	96.185	-1.140	-0.235
2016	0.992				
Kinerja Keuangan		24.920	24.920	0,000	0.000
DAU		26.870	26.656	-0.214	0.000
PAD		114.170	109.061	-0.911	-4.198
2017	1,000				
Kinerja Keuangan		24.970	24.970	0.000	0.000
DAU		26.870	26.870	0.000	0.000
PAD		88.570	88.570	0.000	0.000
2018	1,000				
Kinerja Keuangan		25.340	25.340	0.000	0.000
DAU		27.280	27.280	0.000	0.000
PAD		69.450	69.450	0.000	0.000

Sumber : Hasil olah data, 2019

Berdasarkan hasil Tabel 6 di atas, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu mencapai tingkat efisiensi kinerja keuangan, dimana nilai *technical efisien* lebih kecil dari pada 1.000 yaitu sebesar 0.988. Berdasarkan hasil DEA menunjukkan bahwa *radial movement* pada input DAU sebesar -0.314%. Artinya pemerintah kota lhokseumawe harus mengurangi input DAU sebesar 0.314%, agar mencapai tingkat efisiensi. Selanjutnya *radial movement* pada input PAD sebesar -1.140%, artinya Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu mengurangi PAD sebesar 1.140%, dengan *slack movement* sebesar -0.235%, agar mencapai tingkat efisiensi.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu mencapai tingkat efisiensi kinerja keuangan, dimana nilai *technical*

efisien lebih kecil dari pada 1.000 yaitu sebesar 0.992. Berdasarkan hasil DEA, menunjukkan *radial movement* sebesar -0.214%, artinya pemerintah kota Lhokseumawe harus mengurangi input DAU sebesar 0.214%. Agar mencapai tingkat efisiensi. Selanjutnya *radial movement* pada input PAD sebesar -0.911%. Artinya Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu mengurangi PAD sebesar 0.911%, dengan *slack movement* sebesar -4,918%, agar mencapai tingkat efisiensi.

Tingkat Efisiensi Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam

Hasil analisis DEA pada pemerintah Kota Subulussalam yang belum mencapai tingkat efisiensi yaitu Tahun 2018 yaitu 0,699 lebih kecil dari 1,000. Nilai original, target, *radial movement* dan *slack movement* input-output Kota Subulussalam yang efisien dan inefisiensi periode 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 7
Nilai Original, Target, Radial Movement dan Slack Movement Input Output Kota Sibusalam yang Efisiensi dan inefisiensi periode 2015-2018 (%)

Tahun	Tingkat Efisiensi	Original value	Target Value	Radial movement	Slack movement
2015	1,000				
Kinerja Keuangan		24.300	24.300	0.000	0.000
DAU		26.400	26.400	0.000	0.000
PAD		93.680	93.680	0.000	0.000
2016	1,000				
Kinerja pemerintah		24.500	24.500	0.000	0.000
DAU		26.570	26.570	0.000	0.000
PAD		110.050	110.050	0.000	0.000
2017	1,000				
Kinerja pemerintah		24.750	24.750	0.000	0.000
DAU		26.570	26.570	0.000	0.000
PAD		92.500	92.500	0.000	0.000
2018	1,000				
Kinerja pemerintah		24.990	24.990	0.000	0.000
DAU		26.980	26.980	0.000	0.000
PAD		101.170	101.170	0.000	0.000

Sumber : Hasil olah data, 2019

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kota Subulussalam setiap tahun selama 2015-2018 sudah mampu mencapai tingkat efisien yaitu sebesar 1.000, dimana *original value* sama dengan *target value* dengan *slack moment*

sebesar 0. Berdasarkan hasil DEA menunjukkan bahwa pemerintah Kota Subulussalam telah mampu mengelola sejumlah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sehingga memaksimalkan tingkat kinerja keuangan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2015 terdapat 4 Kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Subulussalam
2. Pada Tahun 2016 terdapat 4 Kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa dan Kota Subulussalam, dan yang tidak efisien Kota Lhokseumawe.
3. Pada Tahun 2017 jumlah Kota yang Efisien secara teknis menurun yaitu 4 Kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam, dan tidak efisien pada Kota Sabang
4. Pada Tahun 2018 terdapat 5 Kota yang efisien secara teknis yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni putu Gina Sukma, Ida Bagus Panji Sedana . (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Bastian (2002). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Cooper, William W dkk. (2006). Introduction To Data Envelopment Analysis And Its Uses With DEA-Solver Software And References.
- Darwanis dan Ryanda Saputra. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1 (2): 183-199
- Halim A.(2002). Manajemen Keuangan Publik. Yogyakarta: UPP AMP.YKPN

- Kustiyahningsih, (2018). Pemrograman Basis Data Berbasis Web Menggunakan PHP & MySQL. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiyah, Listianingsih. (2011). Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Reward dan Profit Center terhadap Hubungan Antara Total Quality Manajemen dengan Kinerja Manajerial. Simposium Nasional Akuntansi VII, Solo.
- Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1): 57-66.
- Neisha. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review* ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E 2579-812X. Volume 1 Number 1. Hlm.13-23.
- Rusydi, H. Muhammad. (2015). Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Takalar. *JEB Jurnal Ekonomi Balance* Volume 8 No. 2.
- Sulistiyowati (2011), Keuangan Pemerintah Daerah, Prenada Media Group: Jakarta.
- Sucipto. (2005). Penilaian Kinerja Keuangan. USU digital library.
- Sumawan, I.W., dan I.M. Sukarta (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1727-1754.
- Tajuddin, Ilham . (2014). The Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Revenue-Sharing Funds On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment. *ISSN (Online) : 2347-3002. Journal of Research in Business and Management* Vol. 2.
- Taras, Tyasani dan Luh Gede Sri Artini (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *EJurnal Manajemen Unud*, 6 (5): 2360-2387.
- UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Wenny, Cherrya Dhia. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2 (1): 39-51